

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN *GAMPONG***  
(Study di *Gampong* Siem Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)

**SKRIPSI S-1**

**Disusun Oleh :**

**HUSAINI**  
**NIM. 441307467**

**Program Studi**  
**Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**2019 M / 1439 H**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN GAMPONG**

(Studi di Gampong Siem Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)

**PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**HUSAINI**


**NIM. 441317467**

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM**

**KONSENTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**Mengetahui**  
**Ketua Prodi PMI-KESOS**

**Disetujui untuk diseminarkan oleh**  
**Penasehat Akademik**

  
**Drs. Muchlis Aziz, M.Si**  
**NIP. 195710151990021001**

  
**Dr. Rasidah, M. Ag**  
**NIP. 197309081998032002**

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan Sebagai  
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)**

**Diajukan Oleh:**

**HUSAINI**

**NIM. 441317467**

**Pada Hari/Tanggal  
Senin, 27 Januari 2020  
14 Rabiul Awal 1441 H**

**Di  
Darussalam - Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah**

**Ketua,**

**Drs. Muchlis Aziz, M.Si  
NIP. 195710151990021001**

**Sekretaris,**

**Dr. Rasyidah, M. Ag  
NIP. 197309081998032002**

**Penguji I,**

**T. Zulyadi, M. Kesos., Ph. D  
NIP. 198307272011011001**

**Penguji II,**

**Drs. Sa'i, S.H, M. Ag  
NIP. 196406011994021001**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry**

**5**



**Dr. Fakhri, S.Sos., MA  
NIP. 196411291998031001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya ;

Nama : Husaini

Nim : 441307467

Jenjang : Strata Satu (S-I)

Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 22 Januari 2019  
Yang Membuat Pernyataan



Husaini  
441307467

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Langkah demi langkah dan rintangan tidak terasa waktu begitu cepat berlalu tanpa meninggalkan jejak yang bisa diikuti. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan *Gampong* (Studi di *Gampong Siem* Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)” yang penulis ajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (SI) pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Rasa hormat penulis yang tak terhingga kepada keluarga besar; ayahanda Hasbi dan ibunda tercinta Rohani, kakak dan adik-adik beserta istri terkasih Aviliani bersama kedua buah hati tersayang Ghinayatun Nafisah dan Ulfatun Fahira yang tak pernah lelah dalam memberi kasih sayang dan support yang tulus kepada penulis, yang setia bersusah payah mengiringi perjuangan ini dan tiada hentinya memotivasi serta mendo'akan penulis dalam usaha penyelesaian tugas akhir ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor UIN Ar-Raniry Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin. AK. MA, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bapak Dr. Fakhri, S. Sos, MA, kepada ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Ibu Dr. Rasyidah, M. Ag dan kepada civitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mendukung penulis baik materi maupun moril. Dan penghargaan kepada Bapak Drs. Mahlil, MA dan Bapak Julianto Saleh, M. Si selaku pembimbing yang penuh dengan kesabaran dalam memberikan bimbingan sehingga selesainya skripsi ini.

Tidak lupa juga penulis sampaikan kepada sahabat saya Taufiqul Hafiz, Karimuddin, Mizan Saputra, Hadiansyah, Sri Raflianti, Ulul Azmi, Supriadi, Heriyono, Mahyuddin, Fakhru Rizal, Marzuki, Khalezar, Muhajir, Samhudi, Raudah, Eka Maulida, Desi Ulharisa, Dinda Maulidya, Marfika, dan kepada teman lainnya seluruh kawan-kawan jurusan PMI leting 2013.

Tidak ada satupun yang sempurna didunia ini, begitu penulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan dan hal-hal yang perlu dikoreksi baik dari segi isi maupun tata penulisannya. Kebenaran selalu datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari penulis sendiri, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt jualah harapan penulis, semoga jasa yang telah disumbangkan semua pihak mendapat balasan-Nya. Amin Ya Rabbal' alamin.

Banda Aceh, 22 Januari 2019  
Penulis

( **Husaini** )

## OUTLINE

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Penjelasan Istilah .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1. Penelitian Sebelumnya yang Relevan .....	9
2.2. Teori Partisipasi .....	12
2.3.1 Bentuk-Bentuk Partisipasi .....	12
2.3.2 Apa lagi .....	12
2.3. Perempuan .....	13
2.3.1 Perempuan dalam Perspektif Islam .....	14
2.3.2 Kebijakan Terhadap Pemberdayaan Perempuan .....	14
2.4. Pembangunan Gampong .....	14
2.5. Tanggung Jawab Pembangunan dalam Perspektif Gender .....	15
2.6. Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Gampong .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>11</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	11
3.2 Lokasi Penelitian .....	11
3.3 Informen Penelitian .....	12
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	12
3.5 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	13
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>

## ABSTRAK

Di *Gampong Siem* peneliti menemukan tidak semua masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan *gampong* terutama para perempuan yang cenderung enggan dan mengabaikannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; Apa saja bentuk partisipasi perempuan dalam pembangunan *gampong*, apa saja faktor pendorong dan penghambat partisipasi perempuan dalam pembangunan *gampong*, dan bagaimana implikasi partisipasi perempuan terhadap peningkatan kapabilitas perempuan dalam pembangunan *gampong*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu mereka yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan *gampong* sebanyak 10 orang. Hasil analisis data menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pembangunan *Gampong Siem* mempunyai peranan penting untuk setiap kegiatan dilakukan, baik itu bersifat sosial masyarakat maupun dalam pengurusan program kegiatan pembangunan *gampong*. Bentuk partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Faktor pendorong dan penghambat partisipasi perempuan yaitu keterbatasan waktu para perempuan, beban ganda sebagai pengurus rumah tangga, besarnya pengaruh laki-laki dalam pemberian izin kepada istri untuk bisa terlibat dalam kegiatan *gampong*, juga konstruksi budaya yang “mengesampingkan” kiprah perempuan dalam dalam pembangunan. Disisi lain, Implikasi partisipasi perempuan terhadap peningkatan kapabilitas perempuan menjadi lebih aktif dalam pembangunan dengan perannya sebagai subjek pembangunan. Serta berkembangnya kesadaran perempuan akan pemahaman kesetaraan gender dalam proses pembangunan.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan kemiskinan tidak lepas dari negara manapun, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan bukan masalah pribadi, golongan, bahkan pemerintah saja, tetapi merupakan masalah seluruh komponen bangsa. Kepedulian, kesadaran, dan kerjasama antar sesama warga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di negeri ini. Dalam rangka mengatasi permasalahan kemiskinan ini diperlukan adanya upaya pembangunan nasional yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat hingga ke tiap-tiap daerah bahkan ke tingkat desa.

Apabila fungsi pembangunan nasional disederhanakan maka ia dapat dirumuskan ke dalam tiga tugas utama yang mesti dilakukan sebuah negara, yakni pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), perawatan masyarakat (*community care*), dan pengembangan manusia (*human development*).<sup>1</sup> Fungsi pertumbuhan ekonomi mengacu pada bagaimana melakukan “wirausaha” (misalnya melalui industrialisasi, penarikan pajak) guna memperoleh pendapatan finansial yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Fungsi perawatan masyarakat menunjuk pada bagaimana merawat dan melindungi warga negara dari berbagai macam risiko yang

---

<sup>1</sup> Edi Suharto, 2009, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, (Bandung; Refika Aditama), hal. 5

mengancam kehidupannya (misalnya menderita sakit, terjerembab kemiskinan, atau tertimpa bencana alam atau bencana sosial). Sedangkan fungsi pengembangan manusia mengarah pada peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menjamin tersedianya angkatan kerja berkualitas yang mendukung “mesin pembangunan”. Agar pembangunan nasional berjalan optimal dan mampu bersaing di pasar global, ketiga aspek tersebut harus dicakup secara seimbang, komprehensif, serta berkelanjutan.<sup>2</sup> Kemudian hal ini harus dimungkinkan untuk terimplementasi secara menyeluruh dan terintegrasi dalam program pembangunan nasional, pembangunan daerah, bahkan pembangunan desa.

Kegiatan membangun desa kemudian terkait erat dengan pemberdayaan masyarakat karena disamping memerangi kemiskinan dan kesenjangan sosial juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan inisiatif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan secara bersamaan. Pendekatan pembangunan dan pemberdayaan ini cenderung mengutamakan alur “bawah ke atas” (*bottom-up*) yang berarti mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat itu sendiri untuk kemudian diakomodasi oleh pemerintah daerah setempat dan diusung sebagai program dalam perencanaan pembangunan daerah tersebut. Karena program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan

---

<sup>2</sup> Edi Suharto, 2009, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, (Bandung; Refika Aditama), hal. 6

secara berkelanjutan harus dilakukan oleh komunitas itu sendiri terutama pada tingkat kelurahan atau desa.<sup>3</sup>

Salah satu strategi untuk mengatasi persoalan kemiskinan adalah melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yaitu merupakan upaya mempersiapkan masyarakat desa untuk meningkatkan harkat dan martabatnya seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat, agar mampu mewujudkan pembangunan yang berasaskan kemasyarakatan dan kegotoroyongan demi menggapai kemajuan dan kesejahteraan secara mandiri.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan strategi pemberdayaan masyarakat menghadirkan paradigma baru dalam pembangunan yang dikenal dengan slogan “Ayo Membangun Desa”. Slogan ini memberikan isyarat bahwa pembangunan negeri ini akan berbalik arah dari kesan sentralisasi menuju paradigma baru yang lebih inten memfokuskan gerak nadi pembangunan pada lingkup pemerintahan terkecil yaitu desa.<sup>5</sup>

Slogan “Ayo Membangun Desa” sampai hari ini masih disematkan sebagai tagar pembangunan nasional oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

---

<sup>3</sup> Sukijo, 2009. *Strategi Pemberdayaan Kemiskinan Pada PNPM Mandiri*. (Jakarta: Cakrawala Pendidikan), hal. 157

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab I ; Ketentuan Umum, Pasal 3 Poin e dan i, hal. 5

<sup>5</sup> PERMENDESA PD TT No. 4 Tahun 2017 (Perubahan PERMENDESA PD TT No. 22 Tahun 2016) dalam Zulfahmi Hasan, 2017. *Peran & Tanggung Jawab Pendamping P3MD dalam Perencanaan-Pelaksanaan Pembangunan Gampong*, (Banda Aceh: Slide Persentasi pada Training Fasilitator Pendamping Desa), hal. 26

Tertinggal dan Transmigrasi (KEMENDESA PDTT) yang menunjukkan bahwa konsistensi pemerintah dalam upaya membangun kemandirian rakyat dalam menanggulangi kemiskinan melalui pembangunan desa.

Pembangunan desa merupakan upaya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>6</sup> Dalam program pembangunan desa ini ada 13 (tiga belas) prinsip pokok yang perlu diterapkan. Dua diantara prinsip tersebut yaitu “partisipatif dan kesetaraan”.<sup>7</sup>

Prinsip partisipasi menekankan bahwa seluruh anggota masyarakat diajak terlibat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan, mulai dari proses perencanaan program, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran sesuai kebutuhan prioritas, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan dan pengawasannya. Disini diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang dimiliki untuk berkontribusi demi terlaksananya pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan bersama. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sebuah program pembangunan mutlak diperlukan karena masyarakatlah yang pada akhirnya akan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab IX ; Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pasal 78 Ayat 1, hal. 43

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab I ; Ketentuan Umum, Pasal 3 Poin e dan i, hal. 5

melaksanakan dan menerima manfaat dari program pembangunan itu. Adanya keterlibatan masyarakat memungkinkan adanya rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap keberlanjutan program yang dijalankan tersebut.<sup>8</sup> Partisipasi ini tentunya tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki semata, namun juga diperuntukkan bagi perempuan karena pembangunan desa juga berasaskan prinsip kesetaraan.<sup>9</sup> Dalam penjelasan lebih lanjut ditemukan bahwa kesetaraan yang dimaksud dalam pembangunan desa ialah kesetaraan gender.<sup>10</sup>

Definisi kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan serta pembangunan.<sup>11</sup> Untuk mencapai kesetaraan gender dalam pembangunan harus dilakukan upaya-upaya pemihakan kepada perempuan. Wujud keberpihakan kepada perempuan dalam pembangunan desa yaitu mengharuskan adanya keterlibatan perempuan pada setiap tahapan pembangunan termasuk perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya.

Dalam hal ini perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut apakah kebijakan itu benar sudah terimplementasi dalam merealisasi program pembangunan desa atau

---

<sup>8</sup> Suparjan dan Hempri Suyatno.2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, (Yogyakarta:Aditya Media), hal.53

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab I ; Ketentuan Umum, Pasal 3 Poin e dan i, hal. 5

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 01 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian PPPA Tahun 2015-2019, Bab I; Ketentuan Umum, Pasal 1 Definisi Istilah, Ayat 24

<sup>11</sup> Ibit,...

hanya sebagai formalitas untuk memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam manajemen program pembangunan desa. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa menggerakkan partisipasi perempuan adalah hal yang tidak mudah dilakukan, mengingat konstruksi budaya telah membentuk pola pikir masyarakat dalam menempatkan posisi perempuan menjadi “terpinggirkan” di lingkungan sosialnya. Fenomena ini terjadi hampir diseluruh wilayah Republik Indonesia bahkan tidak terkecuali di desa-desa atau *gampong-gampong*<sup>12</sup> di provinsi Aceh.

Aceh merupakan sebuah provinsi yang etnis masyarakatnya tersusun dari hasil asimilasi antara pribumi dan pendatang dari berbagai belahan penjuru bumi yang menghasilkan keragaman secara fisik, budaya, bahasa, seni, ritual adat bahkan agama.<sup>13</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa perilaku budaya masyarakat Aceh juga merupakan campuran dari asimilasi dan interaksi berbagai suku bangsa dan agama yang mendominasinya.<sup>14</sup> Secara umum tradisi masyarakat Aceh menganut konsep sosial gender patriarki, dimana peran masing-masing anggota keluarga ditentukan oleh struktur kekuasaan laki-laki (ayah) sebagai kepala keluarga yang secara hirarkis memiliki kewenangan paling tinggi dalam keluarga. Hierarki dilanjutkan pada perbedaan usia dan jenis kelamin anggota keluarga, misalnya saudara laki-laki

---

<sup>12</sup> *Gampong* atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh *keuchik* atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. (Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 *Tentang Lembaga Adat*, Bab 1; Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 14) dalam Lampiran M.Jakfar Puteh, 2012, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta:Grafindo Litera Media) hal, 226

<sup>13</sup> Yusny Saby, *Apa Pentingnya Studi Aceh*, dalam Pengantar Buku *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta:Grafindo Litera Media) hal, xxx

<sup>14</sup> Ibit..., hal. xxxii

memiliki struktur sosial lebih tinggi dibanding saudara perempuan. Sehingga relasi yang terbangun seringkali menempatkan laki-laki memiliki “kekuasaan” lebih besar dibanding perempuan. Hal ini juga masih “kental” terasa dalam lingkungan sosial masyarakat Aceh Besar, khususnya masyarakat *Gampong* Siem Kecamatan Darussalam.<sup>15</sup>

Fenomena keterlibatan perempuan dalam pembangunan *Gampong* Siem telah menimbulkan persepsi atau pandangan yang berbeda antar individu masyarakat di *gampong* itu. Meskipun secara jelas Qanun No. 6 tahun 2009, pasal 22 ayat 1 telah menyatakan bahwa “perempuan mempunyai hak berpartisipasi penuh dalam setiap proses dan pelaksanaan kebijakan”<sup>16</sup> termasuk didalamnya kebijakan dalam ruang lingkup pembangunan, artinya bahwa perempuan merupakan potensi Sumber Daya Manusia yang sama dengan laki-laki, juga mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan *gampong*. Namun realitasnya dalam pelaksanaan pembangunan *gampong* peran laki-laki selalu mendominasi.<sup>17</sup> Narasi diatas mendeskripsikan adanya kekaburan dalam implementasi prinsip partisipasi dan kesetaraan dalam pembangunan *Gampong* Siem.

Akhirnya, berdasarkan pada prinsip partisipasi ini, (yang memberikan kesamaan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk ikut terlibat aktif dalam

---

<sup>15</sup> Observasi Peneliti selama 4 tahun menetap di *Gampong* Siem, Kecamatan Darussalam

<sup>16</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Bab VII; Partisipasi Perempuan Dalam Kebijakan Publik, Pasal 22 Ayat 1

<sup>17</sup> Observasi Peneliti selama 4 tahun menetap di *Gampong* Siem, Kecamatan Darussalam

setiap tahapan pembangunan serta memberikan akses penuh kepada mereka terhadap kontrol pembangunan di *gampongnya*), maka penulis sangat tertarik untuk meneliti bagaimana para perempuan di *gampong* Siem menggunakan kesempatan yang ada untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan *gampongnya*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk partisipasi perempuan dalam pembangunan di *Gampong Siem* Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat partisipasi perempuan dalam Pembangunan di *Gampong Siem* Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar?
3. Bagaimana implikasi partisipasi perempuan terhadap peningkatan kapabilitas perempuan dalam pembangunan di *Gampong Siem* Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi perempuan dalam pembangunan di *Gampong Siem* Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat partisipasi perempuan dalam pembangunan di *Gampong Siem* Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.



3. Untuk mengetahui implikasi partisipasi perempuan terhadap peningkatan kapabilitas perempuan melalui pembangunan di *Gampong Siem* Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat berupa manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah :
  - a. Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan kajian ilmiah khususnya dalam bidang ilmu Pengembangan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai partisipasi perempuan dalam proses pembangunan *gampong*.
2. Manfaat penelitian ini secara praktis adalah :
  - a. Masyarakat mendapat pengertian dan pemahaman tentang perlunya partisipasi aktif dalam proses pembangunan *gampong*, khususnya mengenai partisipasi perempuan.
  - b. Memberi masukan kepada pemerintah untuk dapat mengeluarkan peraturan atau kebijakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya partisipasi perempuan dalam proses pembangunan *gampong*.

## E. Penjelasan Istilah

Judul penelitian yang dipilih yaitu “Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan *Gampong*”. Untuk membatasi penafsiran istilah supaya tidak terjadi salah tafsir, maka istilah dalam judul diperjelas sebagai berikut:

### 1. Partisipasi Perempuan

Menurut Suparjan dan Hempri Suyatno,<sup>18</sup> partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk ikut serta menyumbangkan kemampuan dalam mencapai tujuan kelompok dan ikut bertanggung jawab atas tujuan kelompok tersebut. Partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di *gampong* tempat dilakukannya penelitian ini.

Dalam konsep jenis kelamin (seks), istilah perempuan dapat diartikan sebagai sosok yang memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki vagina dan mempunyai alat untuk menyusui. Sementara itu, menurut konsep gender perempuan merupakan sosok yang lemah lembut, cantik, emosional, irrasional, sabar, cengeng, dan keibuan.<sup>19</sup> Perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini

---

<sup>18</sup> Suparjan dan Hempri Suyatno, 2003, *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, (Yogyakarta : Aditya Media), hal. 57

<sup>19</sup> Mansour Fakih, 2004, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 7

adalah perempuan-perempuan yang tinggal dan menetap di *gampong* tempat penelitian ini dilakukan.

## 2. Pembangunan *Gampong*

Pembangunan yaitu proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.<sup>20</sup> Pembangunan juga dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>21</sup>

*Gampong* merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada dibawah Mukim dalam struktur organisasi pemerintahan di Provinsi Aceh yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh seorang *Keuchik* dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.<sup>22</sup>

Pembangunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pembangunan fisik dan non fisik yang dilakukan di *gampong* tempat penelitian ini dilaksanakan.

---

<sup>20</sup> Suparjan dan Hempri Suyatno, 2003, *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, (Yogyakarta:Aditya Media), hal. 57

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab I ; Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 8, hal. 3

<sup>22</sup> Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 *Tentang Lembaga Adat*, Bab 1; Ketentuan Umum, Pasal 1Ayat 14 dalam Lampiran M.Jakfar Puteh, 2012, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta:Grafindo Litera Media) hal, 226